



REALISASI MANFAAT LANGSUNG BPP KEPADA MASYARAKAT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap memberikan manfaat nyata untuk masyarakat mulai dari pemenuhan prioritas pembangunan nasional dan juga perlindungan masyarakat dan kelompok rentan. Hal ini terlihat dari sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi Rp413,2 T sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I) dimana dari realisasi tersebut, sebesar 72,2% atau Rp298,3 T memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Realisasi manfaat langsung Belanja Pemerintah Pusat (BPP) kepada masyarakat mencakup berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak positif langsung, seperti **Pogam Perlindungan Sosial, Dukungan terhadap UMKM, Dukungan terhadap Kesehatan, Dukungan terhadap Keterjangkauan Energi, Makanan Bergizi Gratis, Dukungan terhadap Pendidikan serta Program Ketahanan Pangan.** BPP yang dialokasikan untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Program Perlindungan Sosial bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu langkah strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui pelaksanaan berbagai penyaluran bantuan sosial (bansos). Sampai dengan triwulan I 2025, pemerintah telah menyalurkan Rp38,9 triliun bansos antara lain melalui penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, program Kartu Sembako bagi 18,3 juta KPM, dan berbagai bansos lainnya.

Dukungan Pemerintah terhadap UMKM yaitu pemberian kemudahan akses terhadap kredit modal kerja kepada pelaku UMKM. Program KUR merupakan salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani dan nelayan, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan

pemberdayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan kepada UMKM yang *feasible* akan tetapi tidak/belum *bankable*. Anggaran subsidi bunga KUR tahun 2025 sebesar Rp38,3 triliun, dengan target penyaluran KUR sebesar Rp300,0 triliun untuk 7,05 juta debitur. Realisasi subsidi bunga KUR s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp57,52 triliun (19,2% terhadap plafon KUR tahun 2025) untuk 1,0 juta debitur.

Dukungan terhadap Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta transformasi sistem kesehatan. Strategi yang dilakukan Pemerintah antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah, dan penuntasan TB melalui deteksi atau skrining. Sampai dengan triwulan I 2025, pemerintah telah menyalurkan Rp33,1 triliun antara lain untuk bantuan iuran PBI JKN Rp11,6 T bagi 96,7 juta peserta, Pemberian Makanan Tambahan (*buffer*) Rp1, 5 M bagi 8,0 ribu bumil KEK dan 20,7 ribu balita kurus, pemberian Makan Bergizi Gratis untuk 3.207 bumil, 4.059 busui, dan 10.045 balita, serta jaminan kesehatan Rp3,0 T bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran.

Program Keterjangkauan Energi bertujuan untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sumber-sumber energi sehingga semua orang dapat mengakses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk Subsidi BBM, Subsidi Listrik, Subsidi LPG. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I 2025 tersebut telah dimanfaatkan untuk menyalurkan solar sebanyak 2.823,9 ribu KL, minyak tanah 82,8 ribu KL, LPG tabung 3kg 1.368,0 juta Kg, serta subsidi listrik yang dimanfaatkan oleh 41,9 juta pelanggan..

Makanan Bergizi Gratis merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan ini diberikan kepada individu sejak masih dalam kandungan, balita hingga usia sekolah. Sampai dengan triwulan I, Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara MBG telah merealisasikan Rp1,1 T yang digunakan untuk pemberian MBG kepada 3,0 juta

penerima yang terdiri dari 3.100 orang ibu hamil, 4.180 ibu menyusui, 11.375 balita dan 2,9 juta anak sekolah.

Dukungan terhadap Pendidikan bertujuan untuk mendukung kebijakan yang difokuskan pada optimalisasi angka partisipasi pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan, Pendidikan tinggi, riset dan inovasi, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, dan tata Kelola pendidikan dan kebudayaan. Untuk mendukung tujuan tersebut Pemerintah melalui anggaran pendidikan berusaha agar seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan yang berkualitas yang diwujudkan melalui berbagai program antara lain melalui PIP, KIP Kuliah dan Bantuan Operasional Sekolah. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Pemerintah telah menyalurkan anggaran pendidikan sebesar Rp127,0 T antara lain melalui PIP untuk 2,8 juta siswa, KIP bagi 794,2 ribu mahasiswa dan BOS kepada 46,8 juta siswa.

Program Ketahanan Pangan merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat cadangan pangan domestik. Sampai dengan triwulan I 2025, pemerintah telah menyalurkan Rp7,4 triliun untuk mendukung program ketahanan pangan. Manfaat realisasi anggaran tersebut antara lain intensifikasi lahan seluas 3.743 Ha (Rp159,9 M), ekstensifikasi lahan/cetak sawah seluas 2.590 Ha (Rp804,8 M), bantuan alsintan pra panen sebanyak 26.815 unit (Rp1,3 T), bantuan benih ikan 1,6 juta ekor (Rp1,16 M), pengembangan bendungan dan jaringan irigasi, serta DAK Non Fisik dan Dana Desa untuk Ketahanan pangan Rp5 T. Selain itu, Pemerintah juga menyalurkan Subsidi Pupuk untuk untuk meningkatkan produktivitas petani. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai triwulan I 2025 sebesar 1,71 juta ton (18,9 % terhadap volume pupuk 2025).

Berbagai Program kebijakan dan kegiatan diharapkan akan semakin berdampak langsung kepada masyarakat sehingga APBN sungguh-sungguh dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.

Realisasi APBN s.d. 31 Maret 2025

Pendapatan Negara	Rp516,1 T (17,2% target)	Belanja Negara	Rp620,3 T (17,1% pagu)	Pembiayaan Anggaran	Rp 250,0 T (40,6% target)
<i>Antara lain:</i>		Belanja K/L	Rp196,1 T (16,9% pagu)	<i>Antara lain:</i>	
Penerimaan Pajak	Rp322,6 T (14,7% target)	Belanja non-K/L	Rp217,1 T (14,1% pagu)	Pembiayaan Utang	Rp 270,4 T (34,8 % target)
Kepabeanaan dan Cukai	Rp77,5 T (25,7% target)	Transfer ke Daerah	Rp207,1 T (22,5% alokasi)	Pembiayaan Investasi	Rp (21,6) T (14,0% alokasi)
PNBP	Rp115,9 T (22,6% target)				
Defisit APBN		Rp104,2 T 0,43% PDB	Surplus Keseimbangan Primer		Rp 17,5 T

LEADING INDICATORS YANG BERPENGARUH TERHADAP POSTUR APBN



Sektor Riil

Inflasi tahunan Maret 2025 tercatat sebesar 1,03% (yoy), naik dari deflasi. Secara bulanan (mtm), inflasi melonjak 1,65%, terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan menjelang Ramadan, seperti beras dan daging ayam. Meski inflasi meningkat, tetap berada dalam kisaran target APBN 2025. PMI Manufaktur tercatat 52,4, menunjukkan ekspansi yang masih berlanjut. Kinerja ini ditopang membaiknya permintaan domestik serta optimisme bisnis terhadap stabilitas harga input dan logistik.

Sektor Eksternal

Sektor eksternal mencatat penurunan harga beberapa komoditas utama. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) turun ke US\$71,11/barel, seiring kekhawatiran perlambatan ekonomi global yang menekan permintaan dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Harga CPO juga turun menjadi US\$954,50/MT, didorong oleh stok global yang tinggi dan pelemahan permintaan dari India serta Eropa. Neraca perdagangan tetap surplus meski sedikit menurun ke US\$3,12 miliar, mencerminkan ekspor yang melemah. Sementara itu, HBA relatif stabil di kisaran US\$123/ton, ditopang permintaan dari India dan Eropa yang masih terjaga.

Sektor Keuangan

Sektor keuangan domestik sedikit mereda tekanannya pada Maret 2025. Yield SBN 10 tahun sedikit menurun menjadi 6,99% dari 7,05% di Februari, seiring perbaikan ekspektasi inflasi jangka menengah dan stabilisasi pada pasar surat utang global. Namun, nilai tukar rupiah tetap melemah ke Rp16.456/US\$, seiring ketidakpastian global dan arus keluar modal asing. BI mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung kredibilitas kebijakan moneter di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

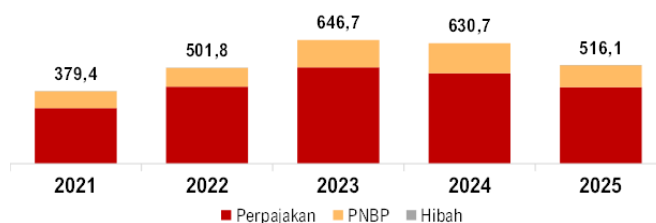
PENDAPATAN NEGARA

KINERJA PENDAPATAN NEGARA MENCAPAI 17,2 PERSEN DARI TARGET APBN 2025

Realisasi pendapatan negara sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2 persen terhadap target APBN 2025. Kinerja penerimaan perpajakan mengalami perbaikan dibandingkan bulan Februari 2025 dengan total sebesar Rp 400,1 triliun. Dari sisi komponen, kinerja penerimaan pajak sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp322,6 triliun. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan PPh 21 dampak implementasi tarif efektif rata-rata serta peningkatan restitusi PPh Badan dan PPN.

Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mampu mencapai Rp77,5 triliun. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh (1) turunnya tarif efektif bea masuk komoditas beras, gula pasir, dan kendaraan bermotor, (2) kenaikan harga CPO dan relaksasi ekspor tembaga, serta (3) penerimaan maju cukai hasil tembakau.

Pendapatan Negara (Rp T)



KINERJA PNPB S.D 31 Maret 2025 DIDUKUNG OLEH PENDAPATAN SDA DAN PNPB KL

Realisasi PNPB sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp115,9 triliun (22,6% dari APBN 2025). Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA) yang menyumbang 43,7% dari total realisasi PNPB s.d 31 Maret 2025. Sementara itu, capaian tertinggi diperoleh dari PNPB K/L yang mencapai 34,6% dari target APBN 2025.

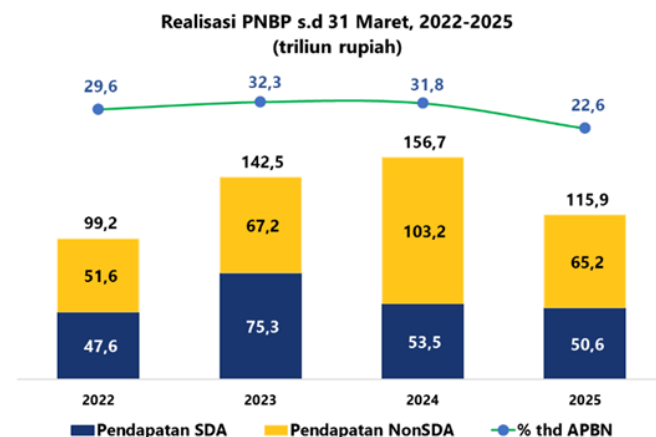
Realisasi Pendapatan SDA Migas mencapai Rp24,9 triliun (20,6% dari APBN 2025). Realisasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ICP dampak rencana dan pemberlakuan tarif perdagangan oleh AS terhadap Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa, serta balasan tarif dari Tiongkok terhadap AS. Pada periode Februari 2025, rata-rata *lifting* minyak bumi sebesar 559,9 ribu barel/hari (2024: 540,1 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 975,4 ribu barel/hari (2024: 879,5 ribu barel/hari). Sementara itu, rata-rata ICP periode Maret 2025 sebesar US\$74,1/barel (2024: US\$80,3/barel).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp25,7 triliun (26,5% dari APBN 2025). Realisasi tersebut utamanya didorong oleh pendapatan SDA pertambangan mineral sebesar Rp23,7 triliun (27,1% dari APBN 2025) terutama berasal dari penerimaan royalti batubara yang dipengaruhi oleh moderasi HBA serta penurunan produksi batubara. Realisasi pendapatan SDA kehutanan mencapai sebesar Rp1,5 triliun (25,8% dari APBN 2025) terutama disumbang dari pembayaran Dana Reboisasi (DR) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dipengaruhi oleh harga dan volume produksi kayu bulat. Realisasi pendapatan SDA kelautan dan perikanan mencapai sebesar Rp0,2 triliun (13,0% dari APBN 2025) berasal dari

Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan. Selanjutnya, realisasi pendapatan SDA panas bumi telah mencapai sebesar Rp0,3 triliun (14,3% dari APBN 2025) meskipun terdapat peningkatan biaya yang signifikan di seluruh WKP milik PGE (Pertamina Geothermal Energy Tbk).

Realisasi Pendapatan KND mencapai sebesar Rp10,9 triliun (12,1% dari APBN 2025). Realisasi Pendapatan KND berasal dari pembayaran dividen Perbankan, yaitu dividen interim BRI tahun buku 2024. Sementara itu pada bulan Maret 2025, terjadi perubahan jadwal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sehingga berdampak pada tidak adanya setoran dividen BUMN.

Realisasi PNPB Lainnya mencapai Rp37,2 triliun (29,1% dari APBN 2025). Realisasi tersebut utamanya disumbang oleh PNPB KL sebesar Rp29,8 triliun (34,6% dari APBN 2025) yang terbesar berasal dari pendapatan BUN atas pendapatan pengelolaan rekening negara dan pendapatan jasa komunikasi dan informatika. Kinerja



PNBP lainnya ini juga disumbang oleh Pendapatan Penjualan Hasil Tambang yang terealisasi sebesar Rp7,5 triliun (20,0% dari APBN 2025) dipengaruhi oleh moderasi HBA. Sementara itu, Pendapatan *Domestic Market Obligation* (DMO) s.d 31 Maret 2025 belum mencatatkan penerimaan.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp17,1 triliun (21,9% dari APBN 2025). Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan BLU Sawit sebesar Rp3,3 triliun (25,1% dari APBN 2025), yang

dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO, serta Pendapatan BLU Nonsawit sebesar Rp13,8 triliun (21,3% dari APBN 2025) dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan jasa layanan rumah sakit dan pendapatan jasa layanan pendidikan.

HIBAH

Penerimaan hibah mencapai Rp0,1 triliun, dipengaruhi baik dari penerimaan hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri. Hibah dalam negeri terutama dari pemerintah daerah, sedangkan hibah luar negeri terutama dari skema terencana multilateral.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret Tahun 2025 mencapai Rp620,3 T (17,1% dari APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 T), terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 T (15,3% dari APBN 2025 sebesar Rp2.701,4 T) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp207,1 T (22,5% dari APBN 2025 Rp919,9 T).

SEPANJANG TAHUN 2024, BPP DIMANFAATKAN UTAMANYA UNTUK MENJAGA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF SERTA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 T tersebut terdiri dari realisasi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp196,1 T (16,9% dari APBN 2025) dan dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako, bantuan iuran PBI JKN, serta pembayaran gaji dan tunjangan. Selanjutnya, Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp217,1 T (14,1% dari APBN 2025) serta dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Adapun penjelasan kinerja Belanja K/L sampai dengan Maret 2025 berdasarkan jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

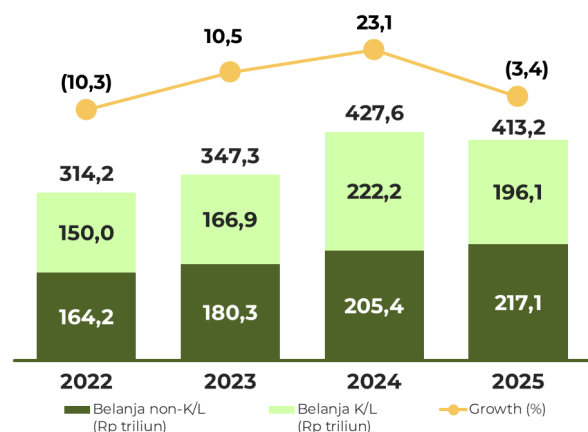
Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp79,5 T (26,0% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp51,1 T dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp28,4 T. Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyaluran THR ASN/TNI/Polri.

Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp51,8 T (10,7% dari APBN 2025). Penurunan belanja barang antara lain disebabkan oleh penyaluran BOS dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang cukup besar. Secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pembayaran subsidi selisih biodiesel (BPDPKS); (2) Penyaluran dana BOS Kemenag; (3) Pelayanan Kesehatan UPT Kemenkes; (4) Penyaluran Beasiswa LPDP; (5) Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Umum dan Keagamaan; (6) Peningkatan Layanan Keamanan dan Keselamatan di Bidang Lintas; serta (7) Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Nasional.

Realisasi Belanja Modal K/L mencapai Rp25,9 T (11,1% dari pagu APBN 2025), yang dipengaruhi antara lain oleh pengadaan peralatan dan mesin. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana bidang pendidikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) pengadaan almatsus oleh Polri; (3) pengadaan sarpras pada Kejaksaan; (4) pengembangan bendungan dan danau, pengendalian banjir, irigasi, jalan, dan jembatan oleh Kementerian PUPR, serta (5) prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi oleh Kementerian Agama.

Realisasi Bantuan Sosial K/L mencapai Rp38,9 T atau 28,8% dari pagu APBN 2025 antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta KPM, (2) penyaluran bantuan kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP dan KIP Kuliah; (5) pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI), serta bantuan permakanan bagi yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas.

Realisasi BPP s.d. 31 Maret 2022-2025 (triliun rupiah)



Realisasi Belanja Non-K/L sampai dengan Maret Tahun 2025 utamanya dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Realisasi pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp58,9 T (34,0% dari APBN 2025). Realisasi Pembayaran manfaat pensiun tersebut termasuk penyaluran THR kepada pensiunan ASN/TNI/Polri. Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp121,7 T (22,0% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp32,4 T (10,5% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi terdiri atas: (1) Subsidi Energi sebesar Rp32,2 T, untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 2,9 juta KL, LPG Tabung 3 Kg sebesar 1,4 juta MT, dan listrik bersubsidi untuk 41,9 juta pelanggan; dan (2) Subsidi Non-Energi sebesar Rp183,9 M, dengan manfaat penyaluran untuk Subsidi Bunga KUR kepada 1,0 juta debitur dan plafon penyaluran KUR sebesar Rp57,5 T, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 1,7 juta ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp518,8 M (0,1% dari APBN 2025), antara lain dimanfaatkan untuk operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (SKK Migas dan Kawasan Bintan Karimun) serta bantuan kemasyarakatan presiden dan wakil presiden.

REALISASI TRANSFER KE DAERAH (TKD) S.D. 31 MARET 2025 UTAMANYA UNTUK Mendukung Pelaksanaan Layanan Publik di Daerah, Antara Lain di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat.

Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Maret 2025 mencapai Rp207,1 T (22,5% terhadap APBN 2025), menunjukkan peningkatan sebesar 12,4% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

Penyaluran DBH s.d. 31 Maret 2025 telah terealisasi sebesar Rp26,1 T (13,6% terhadap APBN 2025), lebih tinggi sebesar 8,2% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi DBH tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp5,6 T dan DBH SDA Rp20,5 T, sedangkan DBH Perkebunan Sawit belum terdapat realisasi penyaluran. Penggunaan DBH pada tahun 2025 antara lain diarahkan untuk mendukung kebijakan DBH *earmarked* bagi sektor-sektor prioritas yang didesain lebih luas dan fleksibel sesuai peraturan perundang-undangan.

Realisasi penyaluran DAU s.d. 31 Maret 2025 mencapai Rp121,2 T (27,1% terhadap APBN 2025), lebih tinggi sebesar 8,6% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran DAU *Block Grant* sebesar Rp119,6 T yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji ASN Daerah dan DAU *Specific Grant* sebesar Rp1,6 T untuk bidang pendidikan, kesehatan, pendanaan kelurahan. Sementara itu, dukungan DAU *Specific Grant* untuk penggajian formasi PPPK yang diangkat pada tahun 2025 belum terdapat realisasi penyaluran.

Realisasi penyaluran DAK s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp39,5 T (21,3% terhadap APBN 2025), lebih tinggi 26,4% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi tersebut sebagian besar berasal dari penyaluran DAK Nonfisik (a.l. Dana BOS sebesar Rp26,0 T, Dana BOP PAUD sebesar Rp2,0 T, Dana TPG ASND sebesar Rp7,2 T, serta Dana BOK dan BOKB sebesar Rp3,2 T). Sementara itu, DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp2,6 M dan Hibah kepada Daerah belum terdapat realisasi penyaluran.

Dana Otsus Aceh dan Provinsi-provinsi di wilayah Papua tahun 2025 diarahkan untuk penurunan kemiskinan, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta mendukung capaian rencana induk percepatan pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Selanjutnya, sama dengan periode tahun sebelumnya, s.d. 31 Maret 2025 belum terdapat realisasi penyaluran Otsus Aceh dan Otsus Provinsi-provinsi di wilayah Papua.

Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta pada tahun 2025 diarahkan untuk: (1) penurunan tingkat kemiskinan; (2) pemberdayaan masyarakat dan UMKM; dan (3) peningkatan penyediaan layanan dasar publik daerah. Selanjutnya, s.d. 31 Maret 2025 realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta mencapai Rp150,0 M (12,5% terhadap APBN 2025).

Realisasi Penyaluran TKD s.d. 31 Maret, 2022-2025 (triliun rupiah)



Dana Desa pada tahun 2025 difokuskan antara lain untuk: (1) penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi sebesar 15% dari pagu yang diterima setiap desa; (2) penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk *stunting*; (3) dukungan program ketahanan pangan; dan (4) operasional pemerintah desa paling tinggi sebesar 3% dari pagu yang diterima setiap desa. Realisasi penyaluran Dana Desa s.d. 31 Maret 2025 mencapai Rp19,8 T (27,9% terhadap APBN 2025), lebih tinggi 17,7% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi Dana Desa tersebut termasuk penyaluran BLT Desa sebesar Rp811,9 M yang ditujukan bagi sekitar 2,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa.

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Fiskal kepada daerah dengan tujuan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola APBD dan meningkatkan kemandirian daerah. Realisasi Dana Insentif Fiskal s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp0,3 T (4,9% terhadap APBN 2025), lebih tinggi sebesar 10,7% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024

PEMBIAYAAN

Pembiayaan anggaran sampai dengan Bulan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp250,0 T atau 40,6% dari APBN 2025. Realisasi ini disumbang dari realisasi pembiayaan utang dan realisasi pembiayaan non-utang.

Pada pos pembiayaan utang, sampai dengan Bulan Maret 2025 secara neto terealisasi sebesar Rp270,4 T atau 34,8% dari APBN 2025. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp282,6 T dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp12,3 T.

Selanjutnya, terkait dengan realisasi pinjaman (neto) dimaksud, terdiri dari realisasi Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (neto) sebesar negatif Rp1,5 T dan realisasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) (neto) sebesar negatif Rp10,7 T.

Sementara itu, dari pos pembiayaan non-utang, realisasi sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar negatif Rp20,4 T atau 12,8% dari APBN 2025, terdiri dari realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp21,6 T, realisasi pemberian pinjaman sebesar Rp1,0 T, dan realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,2 T.

Realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp21,6 T tersebut berasal dari penerimaan kembali investasi berupa penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah sebesar Rp1,0 T dan investasi pemerintah oleh BUN (non-permanen) sebesar negatif Rp22,6 T yang terdiri dari investasi pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar negatif Rp6 T dan investasi pada OIP Perum BULOG sebesar negatif Rp16,6 T untuk Program Penyerapan 3 juta ton beras/setara beras.

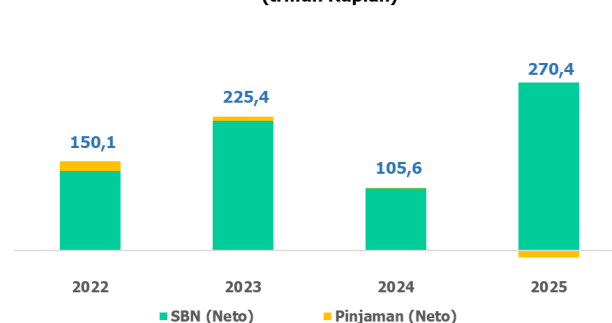
Sampai dengan Bulan Maret 2025, pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar positif Rp1,0 T. Realisasi tersebut berasal dari realisasi Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) sebesar negatif Rp0,2 T, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar positif Rp1,1 T, serta penerimaan cicilan pengembalian dana antisipasi untuk pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo sebesar positif Rp0,1 T.

Selanjutnya, pos pembiayaan lainnya telah terealisasi sebesar Rp0,2 T yang berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA). HPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

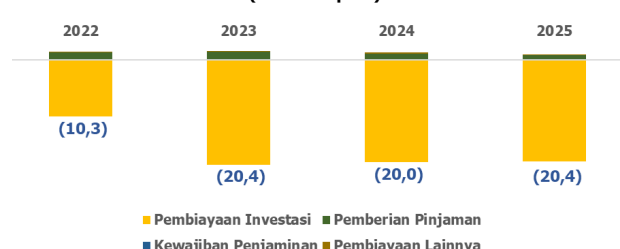
Realisasi Pembiayaan Anggaran s.d 31 Maret, 2022-2025 (triliun Rupiah)



Realisasi Pembiayaan Utang s.d 31 Maret, 2022-2025 (triliun Rupiah)



Realisasi Pembiayaan Non-Utang s.d 31 Maret, 2022-2025 (triliun Rupiah)



EVENT APBN

Penyelenggara : -

Waktu dan : -

Tempat : -

Petugas : -

Peserta : -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN

Gedung Sutikno Slamet

Jl. DR Wahidin No. 1

Jakarta Pusat

Telp: (021) 3849315

Email:

penyusunan.apbn@gmail.com

Ditandatangani secara elektronik